

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Pengangkatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan strategi politik yang sarat dengan kalkulasi elektoral. PSI memanfaatkan popularitas Kaesang sebagai putra Presiden Joko Widodo dan figur publik yang dikenal luas, khususnya di media sosial, untuk memperluas basis dukungan di kalangan pemilih muda. Strategi ini dilakukan dengan asumsi bahwa daya tarik personal Kaesang akan mampu mengangkat citra PSI sebagai partai modern dan progresif yang dekat dengan generasi milenial dan Gen Z.

Namun, strategi ini menimbulkan berbagai persoalan internal. Proses pengangkatan Kaesang dinilai mengabaikan mekanisme kaderisasi formal dan menggeser prinsip meritokrasi yang selama ini diklaim menjadi bagian dari identitas PSI. Ketidakterlibatan kader lama secara transparan memicu faksionalisasi dan ketegangan internal, memperlihatkan adanya jarak antara loyalitas historis dan strategi elektoral baru yang dibawa oleh kepemimpinan Kaesang. Hal ini menjadi tantangan serius dalam membangun konsolidasi organisasi secara berkelanjutan.

Dalam aspek modal politik, Kaesang memang memiliki keunggulan simbolik dan sosial, terutama karena kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Modal ini diperkuat oleh citranya sebagai pengusaha muda yang progresif, serta jejaring yang ia miliki di dunia digital dan bisnis. Namun, modal-modal tersebut belum cukup untuk mengangkat PSI menembus ambang batas parlemen. Hasil Pemilu 2024 yang hanya mencapai 2,80% menunjukkan bahwa popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas.

Modal sosial Kaesang juga belum menunjukkan efek elektoral yang signifikan. Meskipun ia memiliki jutaan pengikut di media sosial, konversi dari popularitas digital ke dalam bentuk suara politik masih terbatas. Beberapa pengamat menyebut bahwa modal sosial Kaesang cenderung semu, karena tidak dibarengi dengan kedekatan emosional (*bonding*) dengan masyarakat akar rumput. Hal ini memperkuat anggapan bahwa popularitas digital tidak cukup tanpa koneksi yang substantif.

Modal ekonomi dan akses terhadap jaringan elite politik menjadi faktor penting dalam menopang pencalonan Kaesang. Keterlibatan aktor-aktor publik, serta kehadiran tokoh-tokoh terdidik yang mendukung PSI, menunjukkan bahwa strategi ini didukung oleh sumber daya yang kuat. Namun demikian, modal ekonomi saja tidak mampu menciptakan legitimasi politik tanpa dukungan ideologis dan partisipasi kader secara menyeluruh. Pencitraan yang dibangun seringkali bersifat sementara dan berisiko menurunkan kepercayaan publik apabila tidak diiringi konsistensi gagasan.

Modal budaya dan moral Kaesang masih menjadi titik lemah. Minimnya gagasan politik dan ketidakterlibatannya dalam wacana publik memperlihatkan keterbatasan personal dalam kapasitas politik. Ketergantungan terhadap figur Presiden Jokowi semakin memperkuat citra bahwa kepemimpinan Kaesang belum sepenuhnya berdiri sendiri. Hal ini berdampak terhadap persepsi publik terhadap PSI yang dianggap terlalu personalistik dan tidak berbasis kaderisasi.

Fenomena ini juga mencerminkan kecenderungan politik nasional yang semakin personalistik dan pragmatis. Strategi pengangkatan figur publik tanpa proses kaderisasi yang memadai mengindikasikan adanya krisis kelembagaan dalam partai-partai politik. Jika strategi semacam ini terus digunakan oleh partai lain, maka yang terancam adalah kualitas demokrasi jangka panjang,

terutama dalam hal pelemahan institusi politik, pengaburan ideologi, dan dominasi patronase kekuasaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan Kaesang memberikan dampak ganda. Di satu sisi, strategi ini berhasil meningkatkan visibilitas PSI di ruang publik. Namun di sisi lain, strategi ini membuka persoalan etik dan kelembagaan yang berpotensi menghambat konsolidasi jangka panjang. Temuan ini memberi kontribusi bagi kajian ilmu politik di Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika modal politik, strategi elektoral, serta tantangan personalisasi kekuasaan dalam konteks partai modern.

5.2. Saran

5.2.1 Saran Praktis

1. PSI perlu memperbaiki sistem kaderisasi yang lebih terbuka, transparan, dan berbasis meritokrasi. Hal ini penting agar partai tidak terlalu bergantung pada figur publik semata, dan mampu menciptakan regenerasi kepemimpinan yang sehat di internal partai.
2. Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum diharapkan lebih aktif menyampaikan gagasan dan strategi politik secara mandiri. Dengan meningkatkan kapasitas komunikasi dan kepemimpinan politiknya, ia dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya.
3. PSI harus membangun dan mempertahankan identitas politik yang konsisten, dengan memperjelas nilai-nilai dasar, visi partai, serta sikap terhadap isu-isu kebangsaan. Kejelasan ini akan membantu pemilih untuk memahami posisi PSI di tengah spektrum politik nasional.

4. Pemanfaatan media sosial harus diarahkan tidak hanya untuk memperkuat citra Kaesang, tetapi juga menjadi sarana edukasi politik yang substantif. Konten digital sebaiknya memuat informasi kebijakan, partisipasi politik, dan nilai-nilai yang relevan dengan generasi muda.
5. Penguatan struktur organisasi partai hingga tingkat lokal sangat penting dilakukan. PSI perlu memperluas dan memperkuat jaringannya, khususnya di daerah-daerah yang belum menjadi basis suara partai, agar dapat membangun dukungan elektoral yang lebih merata secara nasional.

5.2.2 Saran Teoritis

1. Studi ini membuka peluang untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang bagaimana modal politik baik simbolik, sosial, ekonomi, maupun budaya berperan dalam praktik politik dinasti di Indonesia yang demokratis namun masih paternalistik.
2. Penggunaan figur publik dalam kepemimpinan partai menuntut pengkajian ulang efektivitas personal branding dalam menentukan arah elektoral partai. Hal ini dapat memperkaya teori-teori komunikasi politik dalam era digital.
3. Partai-partai baru seperti PSI menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan partai mapan, terutama dalam aspek kelembagaan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menelaah bagaimana kelembagaan partai yang lemah memengaruhi strategi dan hasil politiknya.
4. Hubungan antara modal politik dan peningkatan elektabilitas partai masih membutuhkan pembuktian empiris yang lebih kuat. Studi selanjutnya dapat mengembangkan model analisis kuantitatif terhadap kontribusi tiap modal terhadap hasil suara partai.

5. Fenomena masuknya tokoh populer ke dalam partai menunjukkan adanya irisan antara politik, budaya populer, dan media sosial. Kajian interdisipliner yang menggabungkan ilmu politik, komunikasi, dan studi budaya dapat menjadi pendekatan baru dalam memahami politik kontemporer di Indonesia.